BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 yang disusun oleh Badan Perencanaan pembangunan Nasional pada sebuah buku agenda pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: merosotnya kewibawaan Negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Kelemahan dalam sendi prekonomian bangsa terlihat dari belum selesainya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Pemerintah sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini, seperti PNPM Mandiri, pemberian subsidi (misal BBM dan Listrik), BLT, raskin, dan program-program lainnya. Program-program tersebut memberikan dampak yang positif dalam upaya menanggulangi kemiskinan, namun masih dirasa kurang optimal, hal ini terutama karena terbatasnya APBN (Rudhiyoko, 2009).

Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, masalah keterbatasan anggaran menjadi kendala besar untuk memaksimalkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan (benefit), untuk itu kebijakan fiskal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah anggaran. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap kebijakan fiskal sebagai salah satu instrument untuk mengatasi defisit anggaran. Secara umum kebijakan fiskal adalah langkah yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan sistem pajak dan pembelanjaan negara serta moneter dan perdagangan sehingga kebijakan fiskal ini mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Sementara tujuan utama dalam kebijakan fiskal adalah tercapainya kesejahteraan dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien,

menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan distribusi, tujuan ini menjunjung nilai benefit utama individual tanpa melihat aspek lain. (Safri Haliding, 2013)

Pandangan ini berbeda dengan gagasan Ekonomi Islam dimana dalam fiskal ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, tujuan utama dalam kebijakan fiskal bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran islam seluas mungkin. (Safri Haliding, 2013)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan (Ibrahim, 2006). Zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Miftah, 2008).

Walaupun belum ada teori yang mengatakan adanya hubungan antara jumlah Muzakki dengan dana ZIS yang terkumpul, namun jika diamati dari data tahun 2016 provinsi yang mempunyai dana ZIS tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat, dengan jumlah dana ZIS yang telah terhimpun oleh BAZNAZ berturut-turut sebanyak Rp 130.982 juta, Rp 71.712 juta, dengan jumlah Muzakki tertinggi pula di Provinsi jawa Barat dan DKI Jakarta.

Pada tahun 2016 tingkat pengumpulan ZIS mencapai Rp 5,017 triliun. Bambang Sudibyo Ketua BAZNAS mengatakan, pengumpulan tersebut naik 37,45% dibandingkan tahun 2015 yang hanya Rp 3,65 triliun. Selain kenaikan

dana, BAZNAS mencatat kenaikan juga terjadi pada jumlah pembayar zakat atau Muzakki (Agus Triono,2017). Dalam penelitian Ramadhita yang berjudul Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial memaparkan bahwa potensi dana ZIS di indonesia mencapai 100 milyar lebih pertahun, hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor muzakki dan faktor amil zakat. Muzakki belum sepenuhnya percaya terhadap amil, dalam dalam mendistribusikan dana ZIS. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam mengenali dan mendayagunakan potensi zakat.

Masyarakat dengan Islam sebagai pedoman sudah sewajarnya mengetahui zakat bersifat wajib sedangkan Infaq, dan Sadaqoh bersifat sukarela. Keduanya berperan dalam pencapaian prekonomian yang berkeadilan. Sedangkan dalam fiscal konvensional pajak hingga kini masih menjadi tulang punggung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam menghadapi pengeluaran negara, termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan. Keduanya, pajak dan zakat merupakan dua ujung tombak pemerataan pendapatan yang selama ini berjalan di Indonesia menurut (Sofyan, 2007)

Zakat memiliki kekuatan distribusi pendapatan terutama dalam penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya ini, islam memberikan kesempatan yang luas bagi yang berada (muzakki) untuk mendistribusikan pendapatannya kepada mereka yang tidak mampu. Zakat dapat meningkatkan partisipasi ummat islam dalam pembangunan nasional. Potensi zakat yang digali dengan sungguh-sungguh dan sebagian umat islam dapat mengeluarkan zakat, maka akan melahirkan jumlah dana yang sangat besar. Jumlah tersebut dengan sendirinya dapat memberikan arti tersendiri dalam memecahkan masalah-masalah kemiskinan, pendidikan, pembangunan, keagamaan, dan kesenjangan sosial, dan dapat membantu mempercepat keberhasilan pembangunan nasional. Melalui menejemen yang baik, zakat dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic growth with equity* (A.M Saefuddin, 1996)

Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki peluang besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Hal tersebut juga sudah disadari

oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), yang telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) ke dalam program nasional pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, BAPPENAS juga memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diluncurkan pada tahun 2015. Berdasarkan MAKSI, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diarahkan sebagai koordinator dalam pengaturan, pengumpulan, dan distribusi zakat nasional, dengan Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas kinerja BAZNAS. (Outlook Zakat Indonesia, 2017)

Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin menyampaikan asumsi dasar target pembangunan pada 2018 yakni dalam empat indikator kesejahteraan diantaranya pengangguran, angka kemiskinan, rasio gini, dan juga Pembangunan Manusia (IPM) yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 (Suheriadi, 2017).

Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2016 dalam perkembangannya menurut target pencapaian yang dimiliki pemerintah diantaranya kemiskinan sebesar 9,0-10 persen atau turun dari 2015 yang dipatok 10,3 persen. Adapun rasio gini dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan sebesar 0,4 dan 69,4 Pada 2015, gini rasio dan IPM adalah 0,39 dan 70,1 persen. pada tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,2-5,5 persen. (www.kemenkeu.go.id, 2016)

Untuk mencapai pemerataan pembangunan nasional melalui potensi ZIS dan APBN perlu mengetahui karakteristik setiap Provinsi di Indonesia, sehingga dibutuhkan metode pengelompokan sesuai dengan data. Pengelompokan biasanya menggunakan analisis kelompok untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kelompok yang relatif homogen yang didasarkan pada satu set variable yang dipertimbangkan untuk diteliti (pratiwi,2004). Dalam hal ini ZIS, APBN, dan empat Indikator Kesejahteraan yang menjadi target pembangunan. Di dalam data mining, metode pengelompokan disebut juga dengan analisis cluster. Analisis *cluster* adalah metode yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi

beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya (Gurenescu, 2011).

Pada penelitian ini menggunakan 10 variabel, artinya data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data besar, sehingga SOM (*Self Organizing Maps*) merupakan metode yang tepat dalam penelitian ini. Penggunaan SOM pada penelitian ini dikarenakan metode SOM memiliki kelebihan dua karakteristik terpenting yaitu SOM merupakan perangkat visualisasi dan analisis untuk data berdimensi tinggi. Sehingga SOM merupakan metode yang tepat dalam penelitian ini. Dalam perspektifnya, SOM dapat dilihat bukan hanya menjadi alat melainkan sebagai toolbox yang mengandung fitur angka dan dapat lebih menarik dalam situasi berbeda. (Bacao, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti membuat penelitian **Pengelompokan ZIS, APBN dan Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Menggunakan Kohonen *Self Organizing Maps (SOM)*.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permsalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kondisi ZIS, APBN, dan Indikator Kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2016?
2. Bagaimana hasil analisis *Cluster* pada ZIS, APBN, dan Indikator Kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2016 menggunakan *Self Organizing Maps*?
3. Bagaimana karakteristik potensi penyaluran ZIS, APBN dan kondisi indikator Kesejahteraan di setiap provinsi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Data penelitian berupa data sekunder yaitu :

a. Data tentang rekapitulasi zakat berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2016 yang diperoleh dari basis data http://www.baznas.go.id
b. Data tentang APBN dan empat indikator Kesejahteraan berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2016 yang diperoleh dari basis data http://www.bps.go.id

2. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi, Dana ZIS, Jumlah Muzakki, Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio, IPM, Penerimaan Pendapatan, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Belanja, Pengeluaran Pembiayaan.
3. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Self Organizing Maps* (SOM)
4. Alat bantu yang digunakan dalam analisa data statistik dalam penelitian ini adalah software Microsoft Excel 2016 dan R.3.2.5

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran umum kondisi ZIS, APBN, dan Indikator Kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2016
2. Mengetahui hasil analisis *Cluster* pada ZIS, APBN, dan Indikator Kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2016 menggunakan *Self Organizing Maps*
3. Mengetahui karakteristik potensi ZIS, APBN dan kondisi indikator Kesejahteraan di setiap provinsi di Indonesia

1.5 Manfaat penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran umum kondisi ZIS, APBN, dan Indikator Kesejahteraan tiap Provinsi di Indonesia.
2. Setelah diketahui daerah yang menunjukan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan rendah, maka diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan dalam melakukan upaya dalam pengalokasian dana bantuan ZIS dan APBN.

3. Penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai bahan kajian pemerintah Indonesia khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia terkait Program Pembangunan Nasional.
4. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang penerapan ilmu statistika dalam bidang Ekonomi dan sosial masyarakat.